

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 .Latar Belakang

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak sama di sektor publik. Namun hal yang membedakannya adalah status dan peran yang diberikan dalam masyarakat. Peran yang diberikan oleh masyarakat kepada perempuan bahwa perempuan memiliki sifat feminim seperti halus, lemah, perasa, sopan, dan penakut sehingga menjadikan perempuan sebagai pengikut laki-laki.

Jenis-jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan sangat erat kaitannya dengan sifat maskulinitas dan feminitas, sehingga laki-laki berkiprah di luar rumah, antara lain perannya mencari nafkah untuk keluarga, akhirnya melalui peran ini laki-laki mendapat kesempatan atau peluang untuk mengembangkan diri dan karir. Sedangkan perempuan berkiprah di dalam rumah melalui pekerjaan rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan yang nyata, tidak mengenal jenjang karir dan kerja perempuan di rumah tangga dinilai rendah (Mosse, 2004:58)

Berdasarkan konstruksi sosial pekerjaan laki-laki dan perempuan ini memberi pengaruh terhadap pekerjaan yang tersedia pada lapangan pekerjaan, dimana lapangan pekerjaan didominasi oleh laki-laki, hanya sedikit pekerjaan yang di lakukan oleh perempuan. Itupun pekerjaan yang di dapat tidak terlepas dari ruang domestik perempuan, seperti perawat, juru terlatih dan pelayanan di dominasi oleh wanita (Ollenburger dan Moore, 2002:96).

Hal inilah yang mengharuskan perempuan berkiprah di ranah domestik, dimana bekerja di dalam rumah melalui pekerjaan rumah tangga, seperti merawat anak dan melayani suami yang tidak menghasilkan pendapatan yang nyata, tidak mengenal jenjang karir dan kerja perempuan di rumah tangga dinilai rendah (Mosse, 2004: 58). Akibatnya perempuan sangat sulit untuk bekerja di sektor publik.

Di sektor publik, pekerjaan perempuan biasanya selalu berada di bawah pekerjaan laki-laki. Begitu juga dengan pemberian upah yang selalu diberi di bawah upah pekerja laki-laki. Ditambah lagi dengan beban ganda yang diterima oleh perempuan yang bekerja di sektor publik. Beban ganda yaitu, beban untuk memberikan pengasuhan yang tak dibayar dalam bentuk pelayanan-pelayanan dalam pekerjaan rumah tangga, serta beban untuk bekerja di sektor publik (Ollenburger, 2002: 266).

Budaya patriarki yang kuat juga ikut menambah sulitnya perempuan untuk berkiprah dan bekerja di sektor publik. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, agama dan bahwa pada dasarnya perempuan tercerabut dari akses terhadap kekuasaan tersebut (Mosse, 2007:64).

Untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan diatas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan sedunia pada tahun 1975 di Meksiko kemudian mengeluarkan konsep pembangunan berbasis perempuan. Yakni Perempuan dalam Pembangunan (*Women In Development atau WID*) kemudian

berganti dengan Perempuan dan Pembangunan (*Women and Development* atau *WAD*) selanjutnya berganti dengan Gender dan Pembangunan (*Gender And Development* atau *GAD*) yang diharapkan dapat meningkatkan korelasi positif antara laki-laki dan perempuan (Nugroho, 2008:10).

Di Indonesia, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Kebebasan dan kesempatan ini juga termasuk dalam sektor politik atau badan legislatif. Keikutsertaannya perempuan di bidang politik sebenarnya telah lama ada, namun kesempatan dan kekuatan perempuan masih dipandang sebelah oleh masyarakat. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan ditambah budaya patriarki yang masih mengakar di Indonesia juga menjadi penghambat untuk perempuan berkiprah di dunia politik.

Untuk ikut serta dan terjun langsung ke dunia politik dalam hal ini adalah sebagai wakil masyarakat di parlemen, tentunya para kaum wanita harus mengikuti dan ikut bertarung di pemilihan umum. Sepanjang sejarah, Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali Pemilu, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, keterwakilan perempuan dari setiap pemilu kecenderungannya semakin bertambah.

Walaupun bertambah dari setiap pemilunya tetapi peningkatan tersebut masih jauh dari angka *critical mass* 30 persen, yaitu angka minimal di mana suara perempuan diperhatikan dalam kehidupan publik (Surbakti, 2011:3).

Pertimbangan perlunya perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan ini dipelopori oleh aktivis, kelompok, dan organisasi perempuan, yang muncul secara terbuka menjelang jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, mereka mulai bekerja sistematis pasca-Pemilu 1999. Mereka membawa konsep *affirmative action* (kebijakan afirmasi) dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu demokratis (Surbakti, 2011:3).

Untuk menjalankan kebijakan afirmasi ini, pemerintah menerapkannya dalam bentuk undang-undang pemilu. UU No. 31/2002 dan UU No. 12/2003 untuk Pemilu 2004, UU No. 2/2008 dan UU No. 10/2008 untuk Pemilu 2009, serta UU No. 8/2012 untuk pemilu 2014. Isi dari undang-undang pemilu ini adalah untuk meningkatkan kuantitas perempuan untuk bisa tercapai kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Walaupun sudah ada kebijakan afirmasi tersebut, keterwakilan perempuan masih belum mencukupi kuota 30 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel di bawah ini.



**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Perempuan Calon Anggota DPR dan Perempuan**  
**Anggota DPR Terpilih**

<b>Pemilu</b>	<b>Jumlah anggota DPR</b>	<b>Jumlah anggota perempuan DPR</b>	<b>Presentase</b>
2004	550	61	11,09%
2009	560	101	18,04%
2014	560	97	17,32%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber tahun 2014

Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang juga mengalami naik turun, setelah keluarnya kebijakan afirmasi tersebut, hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Anggota DPRD Kota Padang dan Perempuan**  
**Anggota DPRD Terpilih**

<b>Pemilu</b>	<b>Jumlah anggota DPRD Kota Padang</b>	<b>Jumlah anggota perempuan DPRD Kota Padang</b>	<b>Presentase</b>
2004	45	6	13,33%
2009	45	3	06,66%
2014	45	7	15,55%

Sumber: KRUD dan dari Berbagai Sumber Tahun 2014

Melihat data di atas, ini menunjukkan bahwa kebijakan ini masih belum bisa meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen. Meskipun adanya peningkatan jumlah anggota perempuan pada DPRD dari pemilu tahun 2004 ke pemilu 2014. Dari temuan di atas fenomena ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini nantinya akan ingin mengidentifikasi dan mengetahui persepsi pemilih terhadap calon legislatif perempuan.

## 1. 2 .Perumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang bahwa sulitnya perempuan untuk masuk di sektor publik ini terjadi karena konstruksi sosial serta budaya patriarki yang menjadi faktor penghambat perempuan untuk bekerja di sektor publik. Sehingga ini juga berimbas pada keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan di parlemen dari setiap pemilu memang mengalami peningkatan dari setiap pemilunya. Namun peningkatan ini sebenarnya tidak memenuhi kuota perempuan yang semestinya. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan afirmasi, dalam bentuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu, yang tertera di setiap undang-undang pemilu. Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian, yaitu: ***“Bagaimana pengetahuan pemilih terhadap calon legislatif perempuan ?”***.

## 1. 3 .Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan umum

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pengetahuan pemilih terhadap calon legislatif perempuan.

### 2. Tujuan khusus

1. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan pengetahuan pemilih tentang calon legislatif perempuan.
2. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan penyebab pemilih tidak memilih calon legislatif perempuan.

## 1.4 .Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu

### 1. Aspek Akademik

Penelitian ini dapat memberi kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial Sosiologi, terutama dalam kajian tentang Sosiologi Gender.

### 2. Aspek Praktis

Bahan masukan bagi peneliti lain, khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan keikutsertaan perempuan di dunia politik ini lebih lanjut.

## 1.5 .Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Pendekatan Sosiologis

Fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat dapat ditemukeni dan dianalisis pada berbagai bidang disiplin ilmu dan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Sosiologi salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, dapat meneliti berbagai fenomena tersebut. Dalam penelitian tentang persepsi pemilih terhadap calon legislatif perempuan maka digunakan teori feminisme sosialis.

Feminisme sosialis, menurut Jaggar (1983) melakukan sintesis antara metode historis materialis Marx dan Engels dengan gagasan *personal is political*. Bagi banyak kalangan aliran ini dianggap lebih memiliki harapan di masa depan karena analisis yang mereka tawarkan lebih dapat diterapkan oleh umumnya gerakan

perempuan. Bagi feminisme sosialis penindasan perempuan terjadi di kelas manapun, bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Atas dasar itu mereka menolak visi Marxis klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender. Sebaliknya, feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Oleh karena itu analisis patriarki perlu dikawinkan dengan analisis kelas (Fakih, 1997: 89-90).



Di kalangan feminisme sosialis, baik patriarki maupun kelas, dianggap merupakan penindasan utama. Dalam buku Juliet Mitchell, *Women's Estate* (1997), telah meletakkan dasar-dasar untuk feminisme sosialis. Di dalamnya, ia menggambarkan politik-politik penindasan sebagai suatu konsekuensi, baik dari penindasan patriarkat maupun penindasan kelas. Ia memperkenalkan konsepsi-konsepsi inti feminis sosialis untuk menganalisis dimensi-dimensi penindasan, seperti produksi, reproduksi, sosialisasi, dan seksualitas. Dalam karyanya kemudian, *Psychoanalysis and Feminism* (1974), Mitchell dengan jelas mensejajarkan konsep-konsep patriarki dan kapitalisme. Ia menolak gagasan bahwa persamaan akses, revolusi ekonomi atau control reproduksi, akan menghapus penindasan wanita. Ia menunjukkan, mode ideologis patriarki adalah terpisah dan berbeda dari mode produksi ekonomi, kedua bentuk penindasan itu perlu dilenyapkan untuk membebaskan wanita (Ollenburger dan Moore, 2002: 29).

Bagi feminisme sosialis seperti Eisenstein, ketidakadilan bukan dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih karena penilaian dan anggapan (*social construction*) terhadap perbedaan itu. Ketidakadilan juga bukan

karena kegiatan produksi atau reproduksi dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu yang mereka perangi adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun atas bias gender (Fakih, 1997:89-93). Feminisme sosialis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Karena dirasa sangat cocok untuk mengungkap serta menelaah persepsi pemilih tentang calon legislatif perempuan serta tanggapan baik atau buruknya wanita sebagai calon legislatif. Seperti yang sudah diungkapkan di atas bahwasanya ketidakadilan yang terjadi pada perempuan itu bukan karena *factor* produksi, reproduksi (biologisnya) akan tetapi adalah akibat dari konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan.

### 1.5.2. Konsep Pengetahuan

Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah teori ideologi dan utopia. Ideologi dalam pengertian populernya dimaknai sebagai suatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Sedangkan utopia adalah sesuatu hal yang tidak terdapat di dunia ini dan tidak akan pernah bisa direalisasikan dalam kehidupan, ini biasanya merujuk kepada sebuah sistem kemasyarakatan yang sangat ideal sehingga mustahil bisa terjadi dalam kehidupan nyata.

Dalam analisa ini akan memperlihatkan bahwa pada umumnya terdapat dua pengertian yang berbeda dan terpisah dari istilah “Ideologi” yaitu arti partikular dan arti total (Manheim, 1991:XVII). Konsep partikular dari ideologi tampak bila istilah itu menunjukkan bahwa kita sangsi akan gagasan-gagasan dan penjelasan-penjelasan

yang dimajukan oleh lawan kita. Partikularitasnya terbukti jelas bila konsep partikular dari ideologi ini dibandingkan dengan konsep yang lebih total dan luas dari ideologi. Disini kita mengacu kepada ideologi suatu zaman atau ideologi suatu kelompok sosio-historis konkret, misalnya ideologi kelas, bila kita memusatkan diri pada ciri-ciri dan susunan keseluruhan struktur pikiran zaman atau kelompok (Manheim, 1991:59).

Unsur-unsur umum atau khusus dari kedua konsep tersebut telah tampak jelas. Unsur umum dalam kedua konsep itu tampaknya terdiri dari fakta bahwa keduanya tidak tergantung semata-mata pada apa yang sebenarnya dikatakan oleh lawan untuk mencapai pemahaman atas makna dan maksudnya yang sesungguhnya. Keduanya berbalik kepada subjek, entah individu, entah kelompok, dengan melangsungkan suatu pemahaman mengenai apa yang dikatakan dengan metode tak langsung menganalisis kondisi-kondisi sosial individu atau kelompok. Gagasan-gagasan yang diungkapkan oleh subjek dengan demikian dianggap sebagai fungsi-fungsi kehidupan. Pernyataan ini berarti bahwa pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, proposisi-proposisi dan sistem-sistem gagasan tidak jatuh dari langit, melainkan ditafsirkan dalam terang situasi kehidupan orang yang mengungkapkannya. Lebih lanjut pernyataan itu berarti bahwa ciri khusus dan situasi kehidupan subjek mempengaruhi pendapat-pendapat, persepsi-persepsi, dan penafsiran-penafsiran (Manheim, 1991:60).



Dengan demikian, kedua konsep ideologi itu memperlihatkan apa yang disebut “Gagasan-gagasan” sebagai fungsi dari yang mengungkapkannya, dan fungsi dari posisinya dalam medan sosial. Walaupun kedua konsep itu memiliki ciri yang sama, terdapat perbedaan juga diantara keduanya. Kita hanya menyebutkan yang terpenting dari perbedaan-perbedaan itu dalam buku Manheim ialah:

1. Konsep partikular dari ideologi menggambarkan hanya sebagian pernyataan-pernyataan lawan sebagai ideologi dan ini dilakukan hanya dengan acuan pada isi pernyataan-pernyataan itu, konsep total mempersoalkan *weltanschauung* total lawan (termasuk peralatan konseptualnya), dan berusaha memahami konsep-konsep ini sebagai suatu hasil dari kehidupan kolektif yang dilibati lawan.
2. Konsep partikular tentang ideologi membuat analisis gagasan-gagasan pada taraf psikologis murni. Kalau konsep itu memberikan contoh bahwa seorang lawan menipu atau bahwa ia menyembunyikan atau mendistorsi situasi faktual yang ada, bagaimanapun itu sama-sama memiliki ukuran kesahihan bersama masih diandaikan bahwa mungkinkah menyanggah tipuan-tipuan dan melenyapkan sumber-sumber kesesatan dengan mengacu pada ukuran kesahihan objektif yang diterima bersama oleh kedua pihak yang bertentangan.



3. Berhubungan dengan perbedaan ini, konsep partikular tentang ideologi beroperasi terutama dengan suatu psikologi kepentingan-kepentingan (Manheim, 1991:60).

Konsep total mempergunakan suatu analisis yang lebih fungsional dan formal tanpa acuan apapun pada dorongan-dorongan, mempertajam dirinya dengan paparan objektif tentang perbedaan-perbedaan struktural dalam pikiran-pikiran yang berlangsung dalam latar belakang sosial yang berbeda. Konsep partikular mengandaikan bahwa kepentingan ini dan itu adalah penyebab suatu tipuan atau kebohongan yang mau disingkapkan. Konsep total mengandaikan bahwa ada korespondensi atau instruksi dialog antara situasi sosial dan suatu wawasan, sudut pandang, atau kumpulan penginderaan (Manheim, 1991:62).

Dalam pendekatan sosiologi ilmu karya Karl Manheim yaitu ideologi dan utopia dapat kita rumuskan beberapa aspek penting dari kaedah sosiologi ilmu:

- A. Sesuatu ide tidak terwujud dalam kondisi vakum. Maksudnya, setiap ide yang ada dalam masyarakat telah terkondisi dalam lingkungan sosial, sejarah, ekonomi, politik, maupun ideologi.
- B. Didalam setiap masyarakat, kelompok sosial menjadi setara. Setiap kelompok dapat dikenali melalui perilaku, cara berpikir atau aksi serupa yang dikongsi oleh ramai individu didalamnya.
- C. Walaupun setiap individu berpikir secara sendiri, tidak semua pendapat dan sentimen terbit dan muncul secara alami dari dalam diri individu tersebut.



Sebaliknya, seringkali individu tersebut mengambil ide dan sentimen yang bergelegar didalam kelompok sosialnya.

D. Manusia tidak bertindak dalam lingkungan sosialnya secara persendirian.

Sebaliknya, dia bertindak dengan atau bertentangan dengan manusia-manusia lain didalam kelompok-kelompok teratur yang beragam. Didalam rangka ini juga, mereka akan berfikir dengan atau bertentangan antara satu sama lain. Makanya, terjadi pertarungan ide (competition of ideas) dan dominasi kelompok (group dominance) dalam masyarakat.

E. Didalam setiap fenomena sosial, ada aktor sosialnya, aktor sosial ini mempromosi dan mengadvokasi suatu ide, atau membiarkan ide itu terbit dan berleluasa sehingga menjadi dominan didalam masyarakat. Pada masa yang sama, ketiadaan suatu ide atau sentimen adalah disebabkan adanya proses pelemahan, peminggiran, dan penindasan oleh setengah pihak yang berkepentingan.

Dari perkara-perkara yang disebutkan diatas, dapat kita rumuskan bahwa kita tidak akan memahami aliran pemikiran tertentu selagi origin sosialnya kabur. Inilah kelebihan pendekatan sosiologi ilmu yang dapat kita garap dan terapkan didalam diagnosis pemikiran politik dikalangan masyarakat kita.

Dengan demikian teori ideologi dan utopia dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat atau pemilih pada daerah pilih V kota Padang masih belum paham dalam memilih anggota legislatif perempuan dikarenakan masyarakat atau pemilih

masih belum percaya dengan kepemimpinan perempuan. Dimana pengetahuan masyarakat tersebut masih tertuju kepada caleg anggota laki-laki yang dianggap tegas dalam memimpin.

Sebagai suatu totalitas sistem pemikiran ini terintegrasi secara sistematis dan bukan sekedar pengalaman-pengalaman fragmentaris bisa saja dari para anggota kelompok yang berbeda-beda. Dengan demikian, akibatnya adalah bahwa individu yang dapat dianggap sebagai pengemban suatu ideologi selama kita berurusan dengan konsep ideologi yang menurut definisinya, terarah pada isi yang tersendiri daripada keseluruhan struktur pemikiran, dengan menyingkapkan cara-cara pikir yang keliru dan memperlihatkan kepalsuan-kepalsuan. Setelah konsep total dengan ideologi dipergunakan, berusaha merekonstruksikan pandangan menyeluruh tentang suatu kelompok sosial, dan anggota individu-individu konkret ataupun penjumlahan abstrak dari mereka tak dapat dipandang secara sah sebagai pengemban-pengemban fikiran ideologi ini keseluruhan (Manheim, 1991:63).

Tujuan analisis pada tahapan ini adalah rekonstruksi atas basis teoritis sistematis yang mendasari putusan-putusan (judgements) tunggal dari individu. Analisis-analisis ideologi-ideologi dalam arti partikular, karena membuat isi pikiran individual tergantung pada kepentingan-kepentingan subjek, tak pernah dapat mencapai rekonstruksi dasariah dari keseluruhan pandangan suatu kelompok sosial (Manheim, 1991:63).

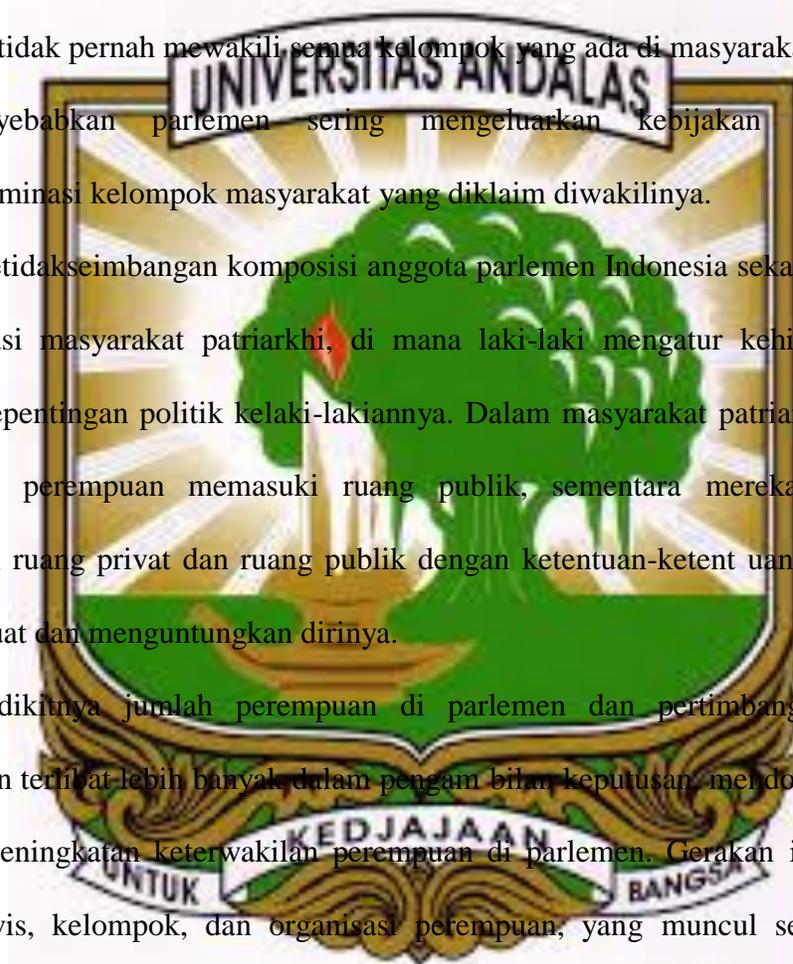


### 1.5.3. Kebijakan Afirmasi untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikkan, parlemen tidak pernah mewakili semua kelompok yang ada di masyarakat. Kenyataan ini menyebabkan parlemen sering mengeluarkan kebijakan yang justru mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya.

Ketidakseimbangan komposisi anggota parlemen Indonesia sekaligus menjadi representasi masyarakat patriarkhi, di mana laki-laki mengatur kehidupan sesuai dengan kepentingan politik laki-lakiannya. Dalam masyarakat patriarkhi, laki-laki mencegah perempuan memasuki ruang publik, sementara mereka bolak-balik memasuki ruang privat dan ruang publik dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mereka buat dan menguntungkan dirinya.

Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan ini dipelopori oleh aktivis, kelompok, dan organisasi perempuan, yang muncul secara terbuka menjelang jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, tetapi mereka mulai bekerja sistematis pasca-Pemilu 1999. Mereka membawa konsep *affirmative action* (kebijakan afirmasi) dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan



afirmasi dan penerapan kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah perempuan di parlemen (Surbakti, 2011:2-3).

Untuk menjalankan kebijakan afirmasi ini, pemerintah menerapkannya dalam bentuk undang-undang pemilu yakni UU No. 31/2002 dan UU No. 12/2003 untuk Pemilu 2004, UU No. 2/2008 dan UU No. 10/2008 untuk Pemilu 2009, serta UU No. 8/2012 untuk pemilu 2014. Isi dari undang-undang pemilu ini adalah untuk meningkatkan kuantitas perempuan untuk bisa tercapai kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk pemilu 2014 undang-undang mengenai keikutsertaan wanita pada pemilu lebih ditekankan lagi pada pasal 55 dan 56 UU No. 8/2012. Pada pasal 55 disebutkan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Ditambah dengan ketentuan pasal 56 ayat 2 bahwa setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon.

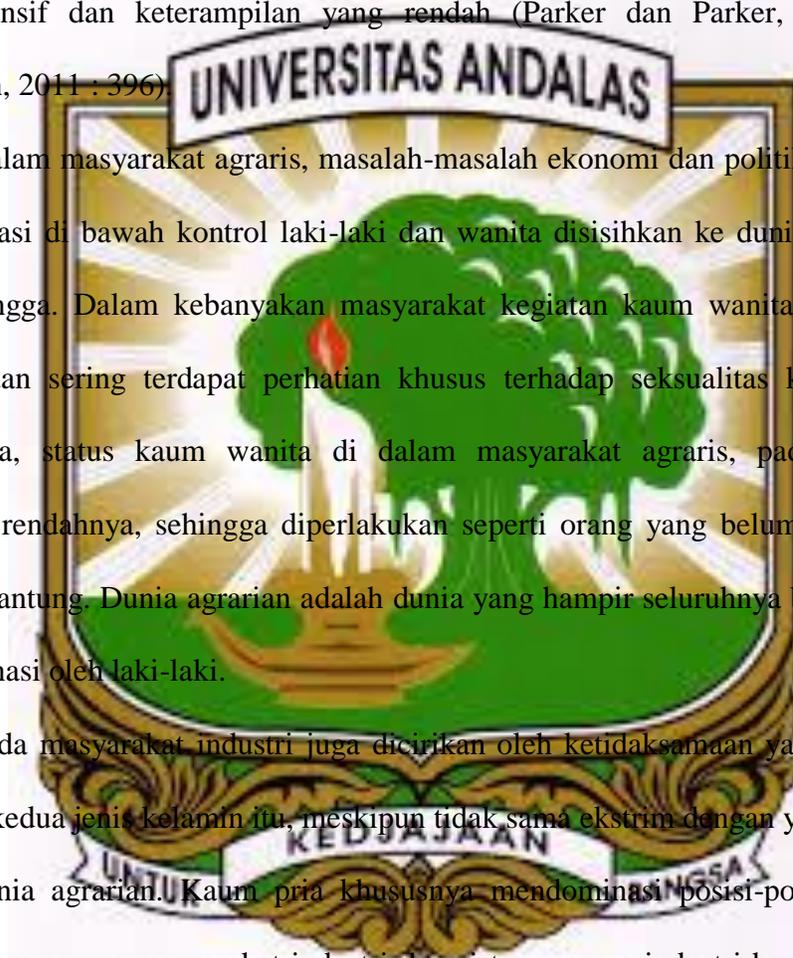
#### **1.5.4. Kesulitan Perempuan Berkiprah dan Bekerja di Sektor Publik**

Dalam pembahasan perempuan dan pekerjaan, maka ada berbagai cara masyarakat dalam menentukan orang-orang untuk peranan pekerjaan menurut jenis kelamin. Murdock dan Provost (1973) telah berusaha mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang paling konsisten untuk feminim yang dapat dijumpai di seluruh dunia. Pekerjaan feminim paling konsisten ialah yang mencakup mengumpulkan bahan bakar, mempersiapkan minuman, meramu dan menyediakan bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan liar, produksi bahan susu, mencuci, mengambil air dan memasak. Kaum wanita secara ekstensif di seluruh dunia ini terlihat di dalam mengasuh anak dan

melakukan kegiatan umum dalam rumah tangga. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang secara konsisten diperuntukkan bagi kaum feminim secara konsisten ialah relatif kurang berbahaya, cenderung lebih bersifat mengulang, tidak memerlukan konsentrasi yang intens, lebih mudah terputus-putus dan kurang memerlukan latihan yang intensif dan keterampilan yang rendah (Parker dan Parker, 1979 dalam Sanderson, 2011 : 396).

Dalam masyarakat agraris, masalah-masalah ekonomi dan politik secara ketat terorganisasi di bawah kontrol laki-laki dan wanita disisihkan ke dunia pribadi dan rumah tangga. Dalam kebanyakan masyarakat kegiatan kaum wanita sangat ketat diawasi dan sering terdapat perhatian khusus terhadap seksualitas kaum wanita. Singkatnya, status kaum wanita di dalam masyarakat agraris, pada umumnya demikian rendahnya, sehingga diperlakukan seperti orang yang belum dewasa dan yang bergantung. Dunia agrarian adalah dunia yang hampir seluruhnya berpusat pada dan dominasi oleh laki-laki.

Pada masyarakat industri juga dicirikan oleh ketidaksamaan yang signifikan di antara kedua jenis kelamin itu, meskipun tidak sama ekstrim dengan yang dijumpai dalam dunia agrarian. Kaum pria khususnya mendominasi posisi-posisi berstatus tinggi dalam semua masyarakat industri dan sistem negara industri berada di bawah pngawasan pria. Kaum wanita sangat dibatasi pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah dan dibayar lebih rendah atau pada sektor rumah tangga dan fungsi-fungsinya (atau keduanya). Kaum wanita masih secara luas dipandang, baik oleh pria maupun wanita sendiri, sebagai pemegang status yang sekunder terhadap kaum pria.



Persamaan menurut jenis kelamin tidak terdapat dalam masyarakat industri di dunia ini (Sanderson, 2011: 397-398).

Kedudukan perempuan di ranah publik di lihat dari berbagai penelitian terhadap angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja umumnya mengidentifikasi berbagai bentuk kesenjangan kuantitatif maupun kualitatif dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Moore dan Sinclair mengidentifikasi dua macam segregasi jenis kelamin dalam angkatan kerja yaitu segregasi vertikal dan segregasi horizontal. Segregasi vertikal mengacu pada terkonsentrasinya pekerjaan perempuan pada jenjang rendah dalam organisasi, seperti jabatan pramuniaga, pramusaji, tenaga kebersihan, pramugari, sekretaris, pengasuh anak, guru taman kanak-kanak, perawat, kasir dan sebagainya. Segregasi horizontal, di pihak lain mengacu pada kenyataan bahwa pekerjaan perempuan sering terkonsentrasi di jenis pekerjaan yang berbeda dengan jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja laki-laki. Adanya segregasi vertikal memberi kesan bahwa dalam tangga jabatan seakan-akan ada sesuatu “langit-langit kaca” (*glass ceiling*) yang menghalangi mobilitas kaum perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya segregasi horizontal pun memberi kesan seakan-akan dalam pasar kerja ada jenis pekerjaan tertentu yang relatif tertutup bagi kaum perempuan, seperti misalnya di bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi (Sunarto, 2004:115).

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan,

konsekuensinya banyak kaum perempuan yang harus bekerja lebih lama dan keras untuk hal itu. Terlebih jika terjadi di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini ditanggung oleh perempuan sendiri, ditambah lagi bila perempuan tersebut harus bekerja di luar rumah, maka ia memikul beban ganda (Fakih, 1997:21).

Akibat dari konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan dan melahirkan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Kemudian imbasnya adalah terjadinya subordinasi kepada perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin dan memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting (Fakih, 1997:15).

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa masyarakat selalu meletakkan perempuan di posisi nomor dua setelah laki-laki atau selalu berada di posisi subordinat. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Daerah Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Dalam rumah yang keuangannya terbatas, jika mengambil keputusan untuk menyekolahkan anaknya maka yang lebih diprioritaskan adalah anak laki-laki. Praktek seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil (Fakih, 1997: 16).

#### **1.5.5. Masih Kuatnya Budaya Patriarki**

Budaya patriarki adalah sebuah budaya yang selalu mendahulukan atau selalu mengutamakan laki-laki. Dari beberapa studi yang dilakukan selama ini, menunjukan

budaya patriarki tumbuh subur dalam lembaga keluarga yang menganut sistem patrilineal, dimana laki-laki pada sistem ini menjadi tokoh penting dan dominan dalam keluarga diberbagai bidang. Akibatnya kehidupan perempuan menjadi sangat tergantung pada laki-laki. Ditambah lagi dengan adanya distingsi kerja antara wilayah domestik dan publik, semakin memperkuat dominsai laki-laki atas perempuan, yang sekaligus memenjarakan dan meminggirkan kaum perempuan dari peran publik atau sosial (Azwar, 2001:2-3).

Kemudian ketika pembagaian kerja semakin menajam antara wilayah publik dan domestik, laki-laki semakin mendominasi dan menguasai aset-aset ekonomi dan perempuan semakin terkurung dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya perempuan semakin tergantung secara ekonomis kepada laki-laki. Pola kepemimpinan ini selanjutnya termanivestasi dalam kehidupan sosial, dimana laki-laki selalu dominan dalam berbagai aspek kehidupan, politik, budaya dan hukum. Pada saat inilah ideologi patriarki dominan dan semakin menindas, sehingga lahir produk politik, sistem nilai dan sistem hukum yang berpihak kepada kepentingan laki-laki, kemudian diinstitusionalisasikan melalui lembaga-lembaga sosial yang akhirnya membentuk kesadaran semu perempuan untuk mematuinya. Perempuan dengan suka rela menerima posisi subordinasinya bahkan cenderung melupakannya. Tidak menganggap ketertindasan ini sebagai persoalan. Dengan begitu, ketertindasan dianggap bukan ketertindasan, malah dianggap sebagai kodrat (Azwar, 2001:16).



### 1.5.7. Penelitian Yang Relevan

Dari penelusuran yang dilakukan ditemukan beberapa laporan yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan Efrizal (2003) dengan judul, “Faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dilembaga legislatif”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perempuan untuk terlibat dilembaga legislatif. Dari hasil penelitian tersebut terungkap bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter aktifis politik perempuan yaitu pekerjaan, pengalaman organisasi serta pengaruh orang tua dalam keluarga. Ternyata anggapan bahwa perempuan itu lemah, lebih mengedepankan emosi ketimbang rasio dalam mengambil keputusan tidaklah benar, dibutuhkan juga campur tangan kebijakan keibuan atau apa yang disebut cantur dan “kekuasaan perempuan” sebagai penyeimbang dalam proses pembentukan kebijakan.

Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Yulianis (2005) dengan judul “Motivasi keterlibatan perempuan dalam partai politik di Sumtra Barat?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi perempuan terlibat dalam sebuah partai politik. Dari penelitian tersebut terungkap bahwa motivasi keterlibatan perempuan dalam partai politik adalah ingin ikut serta dalam sebuah lembaga pengambilan keputusan publik dan menyalurkan aspirasi masyarakat, ingin menambah pengalaman dibidang politik dan memberi nuansa baru dalam dunia politik yang selama ini dianggap kotor. Selain itu perempuan yang terlibat dalam partai politik mempunyai riwayat keluarga yang juga adalah pengurus partai politik sehingga pengaruh keluarga ini juga mendukung untuk terlibat partai politik.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini lebih memfokuskan kepada persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan serta pengetahuan masyarakat terhadap tugas dan fungsi dari lembaga legislatif.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka (Afrizal, 2014:13).

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1995: 3) pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Pendekatan kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial. Hal ini dapat menginformasikan penyebab sebuah kejadian adalah respon orang atau kelompok sosial terhadap aksi orang lain atau kelompok sosial lain serta aksi orang lain mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan dan ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi orang lain dan bagi masyarakat.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif. Moleong (1995:6) menjelaskan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini akan memberikan peluang untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian. Alasan penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif digunakan karena ingin mengetahui tentang segala hal yang menyangkut tentang **pengetahuan pemilih terhadap calon legislatif perempuan**. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan secara keseluruhan data yang didapat dari lapangan yang **berhubungan pengetahuan pemilih terhadap calon legislatif perempuan**.

#### 1.6.2. Informan Penelitian

Informan penelitian diartikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam ( Afrizal 2014: 139). Dalam penelitian ini informan utamanya adalah **masyarakat yakni pemilih dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di daerah pilih lima Kecamatan Nanggalo**.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Kriteria yang dimaksud adalah:

## **1. Pemilih dalam pemilu legislatif 2014**

## **2. Memberikan suaranya dalam pemilu legislatif 2014**

Pemilihan kriteria ini karena sesuai dengan tema penelitian yaitu **pengetahuan pemilih terhadap calon legislatif perempuan.**

Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan asas titik kejenuhan informasi (Muhadjir, 1990: 146). Wawancara dihentikan ketika variasi informan telah diperoleh dilapangan serta data-data atau informasi yang diperoleh melalui analisis yang cermat sudah menggambarkan dari permasalahan yang diteliti.

Informan utama adalah pemilih pemilu legislatif 2014 yang memenuhi kriteria informan yang berjumlah tujuh belas orang, termasuk informan pengamat dua orang yaitu salah seorang pengurus partai politik yang mengetahui seluk beluk tentang pencalonan perempuan dan tentang jalannya kebijakan afirmasi di lapangan dan salah seorang lagi adalah calon legislatif perempuan yang ikut mencalonkan diri di pemilu legislatif 2014. Setelah data informan didapatkan, maka menanyakan kesediaan informan untuk diwawancarai. Wawancara dilakukan apabila informan menyanggupi untuk di wawancarai.

### **1.6.3. Teknik dan Proses Pengumpulan Data**

Menurut Moleong (1995: 112) teknis pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati

atau diwawancarai merupakan data utama yang nantinya akan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio dan pengambilan foto atau film.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah **wawancara mendalam (*indepth interview*)**. Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial antara seorang peneliti dengan informannya (Afrizal, 2014: 137 ). Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan pemilih terhadap calon legislatif perempuan. Wawancara mendalam ditujukan pada beberapa orang informan yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan penelitian guna untuk mendapatkan informasi atau keterangan lebih lanjut tentang permasalahan penelitian tersebut.

Wawancara mendalam merupakan teknik untuk mendapatkan informasi berupa pendirian dan pandangan orang secara lisan serta kita dapat mengetahui alasan seseorang melakukan suatu hal. Maksud digunakan teknik wawancara ini seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 1995: 135) antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh penulis sebagai pengecekan anggota.



Dari wawancara yang dilakukan, data yang didapatkan adalah data-data primer terkait masalah penelitian yaitu **pengetahuan pemilih terhadap calon legislatif perempuan**. Dalam wawancara menggunakan instrumen penelitian yaitu 5W+1H (*what, who, when, where, why* dan *how*). Dengan menggunakan instrumen pertanyaan penelitian tersebut akan menggali data yang berhubungan dengan **pengetahuan pemilih terhadap calon legislatif perempuan**.

Alat-alat pendukung pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah; seperti daftar pedoman wawancara, buku catatan, pena, tape recorder, dan kamera.

1. Daftar pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.
2. Buku catatan dan pena digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang di berikan oleh informan.
3. Tape recorder digunakan untuk merekam sesi wawancara yang sedang berlangsung.
4. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa yang terjadi selama proses penelitian.

Proses wawancara di lapangan dilakukan pada saat informan tidak dalam keadaan sibuk beraktivitas atau setelah pulang kerja. Informan didatangi ke rumah atau di lokasi tempat mereka berada dan ditanyakan kesediaannya untuk melakukan wawancara. Sebelum wawancara mendalam dilakukan, dilakukan persiapan alat pendukung berupa alat tulis, pedoman wawancara, *recorder* dan kamera. Wawancara

dilakukan secara informal, dengan cara penulis mengajukan pertanyaan penelitian kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat.

#### 1.6.4. Jenis Data

Data-data yang diambil pada penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan topik penelitian mengenai **pengetahuan pemilih terhadap calon legislatif perempuan**. Data di dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan observasi (memastikan dan menyesuaikan kebenaran dari apa yang telah diwawancara). Adapun data primer yang diambil adalah **data yang menyangkut tentang pengetahuan pemilih terhadap calon legislatif perempuan**
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari institusi, lembaga dan media yang dapat mendukung dan relevan dengan penulis ini serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian dan artikel.



### 1.6.5. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisa data. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu. Dalam penelitian ini unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang

dilakukan atau dengan pengertian lain obyek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu. Individu disini adalah para pemilih yang ikut memilih dipemilihan umum legislatif 2014.

### 1.6.6. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (dalam Moleong, 1995:103) adalah proses mengatururutan data, mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat di lapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (*field note*).

Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan, dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik dalam bentuk

data primer maupun data sekunder yang dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data. Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Kodifikasi data, yaitu peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan.
2. Kategorisasi data, yaitu pengelompokan data kedalam klasifikasi-klasifikasi berdasarkan kodifikasi data sebelumnya. Kategorisasi data dilakukan setelah data dikelompokkan berdasarkan kodifikasi data, yaitu data yang penting, kurang penting dan data yang tidak penting sama sekali.
3. Menarik kesimpulan, yaitu peneliti mencari hubungan-hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat ( Miles, 1992:16-19). Pada tahap ini akan ditemukan kesimpulan mengenai data-data yang telah dikumpulkan.

Sesuai dengan penelitian ini, maka seluruh data yang dikumpulkan dari wawancara dan pengumpulan dokumen disusun secara sistematis dan disajikan secara

deskriptif serta dianalisis secara kualitatif untuk **mendeskrripsikan pengetahuan pemilih tentang calon legislatif perempuan dan penyebab pemilih tidak memilih calon legislatif perempuan.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik yang menggunakan data lapangan, sehingga data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan pandangan informan tentang bagaimana ia menafsirkan dunia dari segi pendiriannya (Nasution, 1992:10).

#### **1.6.7.Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang. Pemilu legislatif 2014 lalu Kota Padang memiliki lima daerah pilih (Dapil) dari sebelas kecamatan yang ada. Pada pemilu legislatif yang lalu ada dua Dapil yang tidak ada satupun calon legislatif perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif, yakni Dapil empat dan Dapil lima. Dapil lima dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan pada dapil lima ini calon legislatif perempuannya lebih banyak dari jumlah calon legislatif perempuan di dapil empat. Calon anggota legislatif perempuan di daerah pilih empat berjumlah 26 orang dari 12 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif 2014. Pada daerah pilih lima, calon anggota legislatif perempuan berjumlah 36 orang, dari 12 partai politik yang ikut pemilu pada tahun 2014. Berikut ini nama calon anggota legislatif perempuan di daerah pilih lima:



**Tabel 1.6**  
**Nama Calon Anggota Legislatif Perempuan Daerah Pilih V 2014**

No	Nama Partai	Nama Calon Anggota Legislatif Perempuan
1	Nasdem	Dewi Adeska, S.E. Yeasy Darmayanti, S.E., M.Si, Ak Risma wiwita, S.T.
2	PKB	Kartini Tume, S.E., M.M. Defni Anita Desmeri, S.Sos
3	PKS	Rini Yulianti Iswi Apriani, S.Pd Drg. Edrimartati
4	PDIP	Risma Sinaga Yustiana, S.E. Dian Wahyoni Dewi Fitri, S.T., M.T.
5	GOLKAR	Dra. Zulina Koyal, M.pd. Fitri Yona Rahmawati
6	GERINDRA	Ratiza, Ba Faziatini Gafriyulwati
7	DEMOKRAT	Paula Linda Wati, S.pd. Syaharita Zulheninefi, S.H.
8	PAN	Febrina Dwi, A.md Marjuita Nova Surya Dwi Kurnia Sari
9	PPP	Wenny Ratih HJ. Yannelita Sofyan. St Hilda Fitri Ayu, S.E.
10	HANURA	Goba Haryati Yetty Herawati Yanti Zarni
11	PBB	Nurhayatis, S.H. Vivi Rozanur, A.md Rizni Dwina Syarif, S.E.
12	PKPI	Hj. Neli Yeti Okiri Yulla Sari Erinawati

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padang 2014

Dari seluruh calon legislatif perempuan yang ada di atas, tidak satupun mereka yang berhasil lolos atau terpilih sebagai anggota legislatif. Tentunya hal ini menarik untuk diteliti, oleh karena itu mengapa memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian. Dapil lima pada pemilihan umum lalu, meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan

Padang Utara, Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Nanggalo. Kecamatan Nanggalo dipilih sebagai lokasi penelitian utama, alasannya adalah di Kecamatan Nanggalo terdapat jumlah pemilih tetap pemilu yang lebih banyak dari jumlah pemilih di kecamatan lain pada dapil lima, serta memiliki jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari jumlah pemilih perempuan di kecamatan yang lain di Dapil lima. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.7**  
**Daftar Pemilih Tetap Dapil Lima Pemilu Legislatif 2014**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nanggalo	20.927	22.593	43.520
2	Padang Utra	20.710	21.690	42.400
3	Padang Barat	17.328	17.502	34.830

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padang 2014

Jumlah penduduk di Kecamatan Nanggalo juga lebih banyak dari Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang barat. Kecamatan Nanggalo tercatat 59.136 jiwa yang terdiri dari 28.962 penduduk laki-laki dan 30.442 penduduk perempuan. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Selain itu kecamatan Nanggalo dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Maksud dari heterogen disini adalah bermacam-macamnya latar belakang dari masyarakat, mulai dari latar belakang pendidikan sampai perbedaan latar belakang ekonomi masyarakatnya. Tentunya hal ini akan menimbulkan tanggapan atau persepsi yang berbeda-beda setiap individu mengenai calon legislatif perempuan.

### 1.6.8. Definisi Operasional

1. Pengetahuan adalah apa yang diketahui, dipikirkan, dilihat dan dirasakan oleh seseorang tentang sesuatu objek.
2. Pemilih adalah orang yang terdaftar sebagai pemilih serta memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
3. Masyarakat adalah suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar anggota, sehingga menampilkan suatu realitas tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri.
4. Calon legislatif merupakan seseorang yang mencalonkan diri untuk dipilih oleh pemilih guna menjadi anggota legislatif, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..



### 1.6.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan semenjak penulisan proposal penelitian, sampai selesai menjadi skripsi. Uraian kegiatan penelitian terdiri dari beberapa tahap. Untuk lebih jelasnya, jadwal penelitian akan ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.8**  
**Jadwal Penelitian Lapangan**

No	Uraian Kegiatan	2014	2015	2016		2017				
		Des	Jan	Mei	Jun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Penelitian Lapangan									
2.	Analisis Data									
3.	Penulisan Draf Skripsi									
4.	Bimbingan									
5.	Ujian Skripsi									